

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2013
(Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Faizara Prabantari

NIM. 12030113140175

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN

Nama Penyusun : Faizara Prabantari

Nomor Induk Mahasiswa : 12030113140175

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **IMPLEMENTASI PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
46 TAHUN 2013
(Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Dosen Pembimbing : Moh Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 17 Juli 2017

Dosen Pembimbing,

(Moh Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 19660616 199203 1002

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Faizara Prabantari

Nomor Induk Mahasiswa : 12030113140175

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **IMPLEMENTASI PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
46 TAHUN 2013
(Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Dosen Pembimbing : Moh Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 17 Juli 2017

Dosen Pembimbing,

(Moh Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 19660616 199203 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Faizara Prabantari

Nomor Induk Mahasiswa : 12030113140175

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **IMPLEMENTASI PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
46 TAHUN 2013
(Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 Agustus 2017

Tim penguji:

1. Moh. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
3. Dr. Rr. Karlina Aprilia, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Faizara Prabantari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,

(Faizara Prabantari)

NIM : 12030113140175

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan mengacu pada tarif umum berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, dan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 dalam setahun. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan serta bagi pemerintah.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan kepada responden (UMKM Orang Pribadi dan Badan) untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data penelitian.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: 1) Terdapat perbedaan jumlah beban PPh yang harus dibayar menggunakan tarif UU 36/2008 dan tarif PP 46/2013. PP 46/2013 akan merugikan WP badan yang memiliki margin laba di bawah 8% serta merugikan WP orang pribadi yang memiliki margin laba di bawah 7,91% untuk skala usaha menengah, 10,7% untuk usaha kecil, serta 40,3% untuk usaha mikro. 2) Data hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam setahun merasa dirugikan atas PP 46/2013 dan lebih memilih menggunakan tarif UU 36/2008. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum sesuai dengan teori daya pikul dan beberapa syarat dalam memungut pajak, antara lain syarat keadilan, dan syarat ekonomis. 4) Dampak atas penerapan PP 46/2013 dapat menguntungkan WP namun menurunkan penerimaan pajak serta dapat merugikan WP namun meningkatkan penerimaan pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, UMKM

ABSTRACT

This study aims to determine differences income tax for individual taxpayer and corporate taxpayer refers to general rate based on Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 that regulates about income tax for taxpayers and final rate based on Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 that regulates about income tax for Micro, Small, and Medium Enterprises who has gross income until Rp 4.800.000.000 per year. The study also aims to determine the impact of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 for the individual taxpayer, corporate taxpayer, and for the government.

Methods of data collection in this research is use a questionnaire that distributed to respondents (MSMEs) to answer questions pertaining on the application of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. The descriptive qualitative method is used to analyze the data.

The results of the study found that: 1) There are differences in the amount of income tax expense to be paid using Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 and Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 rates. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 will disadvantageous corporate taxpayers that have profit margin below 8% and will disadvantageous individual taxpayers that have profit margin below 7.91% for medium enterprises, 10.7% for small enterprises, as well as 40.3% for micro enterprises. 2) The data from questionnaire indicate that the majority of MSMEs which are in Central Java and Special Region of Yogyakarta with gross income until Rp 4.800.000.000 per year feel disadvantageous over PP 46/2013 and prefer to use UU 36/2008 rates. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 is not in accordance with Daya Pikul Theory and some of the requirements in collecting taxes, among other justice requirement, and economic requirement. 4) The impact of PP 46/2013 implementation can advantageous taxpayers but will decrease tax revenue and can disadvantageous taxpayers but will increase tax revenues.

Keywords: *Income Tax, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, MSMEs*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)** dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Proses penyusunan skripsi ini sangat menguras waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Terdapat beberapa kendala yang penulis temui di lapangan. Namun berkat dukungan, bantuan, motivasi, dan doa dari keluarga, sahabat, teman-teman, dan dosen pembimbing akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
2. Bapak Fuad, SET, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Moh Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ide, dukungan, semangat, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Endang Kiswara, SE, M. Si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta para staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberi arahan untuk penulis selama menjalani studi.
6. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibuk yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan juga ide-ide kepada penulis dalam mengerjakan skripsi. Yang selalu bersabar dalam menghadapi saya. Semoga Bapak dan Ibuk selalu diberi perlindungan dunia dan akhirat, aamiin.
7. *My beloved sister*, mbak Sana, terima kasih atas segala pelajaran dan pengalaman yang diberikan. Maaf apabila sering membuat emosi karena saya nggak mudengan.
8. Keluarga besar dari Wonosobo dan Nglorog, terimakasih atas doa dan supportnya.
9. Sahabat sekaligus keluarga di kampus, *Cactos Family* (Julius, Andriyo, Anin, Dara, Dewi, Handre, Hapsa, Mutiara, Nur, Ughro, Uly, Uchi, Webe, dan Yevi) yang selalu memberikan semangat satu sama lain.
10. Sahabatku *Abalones* (Nopik, Azmim, Sheila, Amel, dan Laras) yang selalu berkeluh kesah bersama, yang selalu memberikan semangat dan doa satu sama lain.
11. Sahabatku sedari SMA (Mella, Nopik, Bella, Imas, dan Luthfi) yang selalu memberikan semangat dan doa satu sama lain;

12. Teman-teman seperjuangan bimbingan Pak Didik yang saling membantu, memberikan informasi, dan selalu bersedia berbagi keluh kesah selama ini.
13. Teman-teman angkatan Akuntansi 2013 yang sudah berjuang bersama-sama dari awal masuk kuliah. Terima kasih atas memori indah yang diberikan selama ini.
14. *My beloved partner, you're my best! Thank you for your time, your kindness, your patience and care. Thank you for everything that you gave for me.* Terima kasih atas semangat dan doanya.
15. Teman-teman dari dunia virtual, terutama Dina yang selalu memberi semangat, selalu bertanya bagaimana kelanjutan skripsi saya dan menanyakan kapan sidang.
16. Teman-teman EXID INDONESIA dan ReVeluv Semarang.
17. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan penulis selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik diharapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 17 Juli 2017

Penulis

Faizara Prabantari

NIM. 12030113140175

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN.....	i
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Pajak.....	14
2.1.1.1 Pajak Penghasilan Terutang	14
2.1.1.2 Pajak Penghasilan (PPh Final)	15
2.1.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 25	15

2.1.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pasal 28A	16
2.1.2 Teori Daya Pikul.....	16
2.1.3 Dimensi Keadilan	17
2.1.4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	19
2.1.4.1 UU PPh Pasal 17	19
2.1.4.2 UU PPh Pasal 31 E.....	21
2.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	22
2.1.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	24
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Penelitian	32
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Pemilihan Sampel	36
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5 Metode Analisis	38
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.2 Penerapan PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM.....	40
4.2 Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang	45
4.2.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	47
4.2.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	51
4.3 Konsep Keadilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak.....	55
4.4 Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	58
BAB V.....	59
KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	61
5.3 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
Lampiran A Daftar Pertanyaan Kuesioner	71
Lampiran B Diagram Hasil Kuesioner	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Tarif PPh WPOP menurut UU 36/2008	20
Tabel 2.2	Daftar Tarif PPh WP Badan menurut UU 36/2008.....	22
Tabel 2.3	Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omzet	26
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1	Hasil Kuesioner Penerapan PP 46/2013 pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	41
Tabel 4.2	Perubahan Penghitungan PPh Orang Pribadi dan Badan yang Diterapkan untuk UMKM	46
Tabel 4.3	Laporan Laba Rugi CV. X Tahun 2015	48
Tabel 4.4	Laporan Laba Rugi CV. X Tahun 2016	49
Tabel 4.5	Perhitungan PPh CV. X Menurut UU 36/2008 dan PP 36/2008.....	50
Tabel 4.6	Laporan Laba Rugi WPOP X Tahun 2015	52
Tabel 4.7	Laporan Laba Rugi WPOP X Tahun 2016	53
Tabel 4.8	Perhitungan PPh WPOP X Menurut UU 36/2008 dan PP 46/2008	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Pertanyaan Kuesioner	71
Lampiran B Diagram Hasil Kuesioner.....	73

MOTO DAN PERSEMBAHAN

BE THANKFUL FOR EVERYTHING

-Park Sooyoung-

NEVER DO THINGS THAT YOU WILL REGRET LATER.

-Kim Taeyeon-

*NO MATTER HOW DIFFICULT AND HARD SOMETHING IS, I WILL ALWAYS
BE POSITIVE AND SMILE LIKE AN IDIOT*

-Park Chanyeol-

*THERE'S NOTHING WRONG WITH BEING A LOSER, IT JUST DEPENDS ON
HOW GOOD YOU ARE AT IT.*

-Billie J. Armstrong-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Bapak, Ibu, Kakak, beserta keluarga besar yang selalu memberi doa, semangat, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti*
- *Sahabat-sahabat yang selalu memberi saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2016, CIA World Factbook menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk peringkat nomor lima terbanyak di dunia. Urutan negara dengan penduduk terbanyak yaitu China, diikuti India, kemudian Uni Eropa, dan peringkat keempat adalah Amerika Serikat. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 258.316.051 jiwa atau sekitar 3,5% dari total jumlah penduduk di dunia. Jumlah penduduk yang banyak tersebut dapat memicu pergerakan perekonomian yang memiliki potensi besar dalam memajukan perekonomian suatu negara.

Di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya melakukan usaha industri yang dikategorikan menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) serta Usaha Besar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah mendominasi perekonomian Indonesia sudah sejak lama dan terus berkembang seiring dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dari sisi informasi maupun bantuan kredit yang disalurkan. UMKM berperan cukup besar dalam menciptakan Produk Domestik Bruto (PDB) serta meningkatkan pendapatan negara, salah satunya adalah penerimaan pajak. Jumlah UMKM yang banyak memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian nasional dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014). Anggaran dan

Penerimaan Belanja Negara (APBN) melaporkan besar penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar Rp 1.360,1 triliun atau hampir mencapai 74,6% dari total pendapatan negara (<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>).

Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayar warga negara menurut undang-undang yang berlaku. Pajak yang dibayar oleh warga negara kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah maupun pusat yang menjadi salah satu sumber pendapatan suatu negara. Menurut Feldmann (dikutip dari Resmi, 2013), pajak adalah sesuatu yang harus dilaksanakan yang sifatnya memaksa sepihak dan terutang kepada pemerintah berdasarkan norma yang berlaku umum tanpa timbal balik, dan dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran pengeluaran umum negara. Pada Undang-Undang Perpajakan Negara dijelaskan tentang kriteria warga negara yang memiliki usaha ataupun penghasilan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang ditanggung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Subjek pajak yang masuk dalam kriteria Undang-Undang Perpajakan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Setiap UMKM yang memperoleh *profit* ataupun penghasilan dari usahanya diwajibkan untuk membayar beban pajak.

Selain meningkatkan pendapatan negara, UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar (Herman, dkk 2013). Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2013 jumlah UMKM mencapai 57.895.721 unit, sedangkan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 114.144.082 orang. Namun di sisi lain, UMKM yang mendominasi perekonomian negara belum dapat memberikan penerimaan pajak secara optimal. Ibrahim (dalam Butar, 2013) menyatakan bahwa data penerimaan

pajak tahun 2005 hingga 2012 menunjukkan penerimaan pajak didominasi bukan oleh UMKM, namun oleh usaha besar yang jumlah populasinya kurang dari 1%. Hal ini dikarenakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih berfokus terhadap wajib pajak usaha berskala besar, sedangkan tindakan pemantauan pada para pengusaha UMKM belum dilakukan secara optimal, serta rendahnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM (Rakhmad, 2015). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM disebabkan kurangnya partisipasi dalam membayar pajak dikarenakan peraturan perpajakan yang rumit dan tarif pajak yang tinggi (Ojeka, 2012). Sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang masih kurang maksimal juga menjadi salah satu alasan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Resyniar, 2013). Selain itu, usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM lebih mengutamakan operasional, sehingga pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan. Pembukuan atau administrasi merupakan kendala yang banyak dihadapi oleh UMKM yang dapat membuat lemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM (Ardiansyah, 2014). Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mendorong pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan pembayaran pajak yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang dapat menambah tingkat pendapatan negara (Syarifudin, 2015).

Mungaya et al (dalam Handayani dan Noviori, 2015) mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah membuat kebijakan pajak bagi UMKM dengan menetapkan tarif perpajakan yang lebih rendah dengan harapan dapat memberikan pengaruh dalam pertumbuhan UMKM. Kebijakan perpajakan ini telah diatur pada PP No. 46/2013, yang berlaku sejak 1 Juli 2013.

Peraturan ini menggantikan peraturan lama, yaitu UU No. 36/2008 yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh). Peraturan Pemerintah No. 46/2013 mengatur pajak penghasilan bagi UMKM yang mempunyai omzet hingga Rp 4.800.000.000 selama setahun pajak. Wajib Pajak (WP) harus menanggung beban pajak final sebesar 1% dari peredaran brutonya. Dalam PP 46/2013 yang menjadi dasar adalah catatan peredaran bruto atau omzet (*record keeping*) setiap bulannya sehingga tidak lagi menggunakan dasar pembukuan (*book keeping*) yang mewajibkan wajib pajak membayar angsuran pajak (PPh pasal 25 UU PPh) setiap bulannya. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bertujuan memudahkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan.

Ada 3 (tiga) aspek yang membedakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aspek yang pertama adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pada UU 36/2008 dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan neto yang diperoleh dari hasil pengurangan penghasilan bruto dengan biaya-biaya operasional. Sedangkan pada PP 46/2013 wajib pajak tidak perlu menentukan penghasilan neto untuk menghitung pajak penghasilan serta tidak perlu menyusun laporan laba rugi karena DPP berasal dari laporan penjualan. Aspek yang kedua adalah tarif pajak, pada UU 36/2008 pasal 31 E ayat (1), WP yang memiliki omzet mencapai Rp 4.800.000.000 setahun menggunakan tarif umum sebesar 25% dan mendapat fasilitas pengurang sebesar 50%. Sedangkan pada PP 46/2013 tarif pajak penghasilannya sebesar 1% langsung dari penjualan atau peredaran bruto. Walaupun ada penurunan tarif yang cukup besar, namun jumlah beban pajak penghasilan akan tinggi karena dasar

pengenaan pajak berasal dari jumlah peredaran bruto bukan dari jumlah penghasilan neto. Aspek yang ketiga adalah tata cara pelaporan, pada UU 36/2008 wajib pajak melaporkan pajak terutang pada PPh masa dan tahunan, sedangkan PP 46/2013 WP tidak perlu melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) karena pajak penghasilan yang harus dibayar bersifat final, sehingga jumlahnya nihil.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memang memiliki keunggulan karena kesederhanaannya menggunakan tarif final 1% dalam penghitungan pajak penghasilan, sehingga membuat lebih efisien bagi wajib pajak, dan bagi pemerintah biaya pemungutan (*cost of collection*) yang harus dikeluarkan juga lebih rendah (Syarifudin, 2015). Namun selain keunggulan tersebut, PP 46/2013 juga memiliki kelemahan yaitu masih terdapat potensi ketidakadilan karena tarif pajak yang sama besar bagi wajib pajak orang pribadi (UMKM) dengan tidak memperhatikan laba yang diperoleh. Padahal, masing-masing UMKM memiliki margin laba (*profit margin*) yang berbeda-beda. Sebagai contoh, bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tinggi namun margin laba yang diperoleh hanya 1% hingga 5% harus membayar beban pajak yang lebih besar yang tentu akan dirugikan dengan adanya peraturan ini. Selain itu, penghitungan dalam PPh final tidak mengenal rugi, hal ini diatur dalam pasal 8 ayat 2 huruf (c) PMK 107/203 yang menyebutkan bahwa kerugian yang terjadi dalam tahun pajak tertentu yang dikenai pajak penghasilan memiliki sifat final dan tidak dapat dikompensasi pada tahun pajak selanjutnya. Namun pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa wajib pajak yang mengalami kerugian berhak atas kompensasi serta tarif pajak yang bersifat progresif

berdasarkan penghasilan neto. Hal ini tentu mengundang pro dan kontra karena dasar pengenaan pajak langsung dari peredaran bruto tanpa memperhitungkan faktor pengurang seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), beban operasional, beban modal, depresiasi dan biaya lain-lain. Di sisi lain, UMKM yang memiliki omzet yang lebih besar dari Rp 4.800.000.000 dan margin laba lebih dari 10% mungkin akan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan memecah unit usahanya agar masing-masing unit usaha dikenai tarif pajak final 1% (Syarifudin, 2015).

Sebagian pelaku UMKM beranggapan bahwa jika dasar pengenaan pajak langsung dari penjualan, maka pengusaha kecil tidak akan terbuka mengenai penjualannya, mereka akan berusaha menurunkan jumlah penjualan agar pajak penghasilannya juga menurun. Karena pada kenyataannya, penjualan dalam jumlah yang besar belum tentu menghasilkan laba yang besar pula. Kadang banyak dari mereka harus menanggung pengeluaran-pengeluaran yang besar agar usahanya tetap berjalan atau bahkan sampai merugi. Oleh karena itu, penjualan tidak dapat dijadikan ukuran kemampuan usaha pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya (Resyniar, 2013).

Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas penerapan PP 46/2013 pada UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk mengetahui penerapan PP 46/2013 salah satunya adalah penelitian yang dilakukan

Aprilia (2015) dengan menggunakan informan utama dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengawasan Dan Konsultasi (Waskon) KPP Pratama Lubuk Pakam dan informan kunci yaitu *Account Representative* (AR). Sementara itu sampel yang digunakan adalah masyarakat atau wajib pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Lubuk Pakam sebagai responden atas kuisisioner yang disebar. Aprilia menjelaskan bahwa pada tahun 2013 hingga 2014 bahwa PP 46/2013 telah terlaksana dengan baik. PP 46 telah memberikan dampak positif bagi wajib pajak dengan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tetapi mengenyampingkan aspek keadilan dengan tetap harus membayar pajak walau dalam keadaan merugi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Diatmika (2013) yang membahas tentang Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menggunakan sampel perusahaan dagang yang berada di Banjar Cica Abianbase Mengwi, Bali. Diatmika menemukan hasil bahwa PP 46/2013 lebih menguntungkan bagi sampel perusahaan yang diambil dengan *profit margin* 7% yang mempunyai peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam setahun dengan tarif final sebesar 1% daripada tarif umum sebesar 25%.

Furi (2014) melakukan penelitian tentang penerapan PP 46/2013 pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang merupakan pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batang. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perbedaan PPh terutang bagi WPOP yang terdaftar di KPP Batang bagi usaha mikro tidak menguntungkan karena dengan menerapkan PP 46/2013 mereka tetap

diharuskan membayar pajak sedangkan dalam menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, usaha mikro dengan omzet kecil perhitungan pajaknya nihil karena harus dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara untuk usaha kecil dan menengah merasa diuntungkan karena berapapun omzet yang diperoleh hanya dikenakan tarif final sebesar 1%.

Handayani dan Noviri (2015) meneliti penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada Perhitungan PPh Terutang dengan PT. AI sebagai sampel penelitian. Bagi PT. AI, PPh terutang berdasarkan PP No. 46 lebih kecil dibandingkan nilai PPh terutang berdasarkan umum UU pajak penghasilan karena memberikan kemudahan serta kesederhanaan perhitungan serta jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan lebih kecil, dibandingkan dengan menerapkan peraturan umum UU Pajak Penghasilan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Prihantari dan Supadmi (2015), menemukan hasil bahwa dampak implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 UMKM di Kota Denpasar yang ditinjau dari aspek *ability to pay* termasuk dalam kategori adil. Sedangkan ditinjau dari aspek keadilan termasuk dalam kategori tidak adil karena PPh Final 1% dianggap tidak menguntungkan karena pengenaan pajak berdasarkan penjualan.

Setiawati dan Tjahjono (2015) melakukan penelitian tentang penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 terhadap Pajak Penghasilan dan Profit PT. X yang merupakan badan usaha menengah kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 milyar yang bergerak di bidang produksi peralatan kantor. PT.X lebih diuntungkan menggunakan tarif pajak lama yaitu tarif pajak berdasarkan UU 36/2008

dibandingkan menggunakan tarif yang baru yaitu tarif pajak berdasarkan PP 46/2013.

Sementara pada penelitian yang dilakukan Syarifudin (2015) untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 dan Implikasinya menggunakan simulasi atau ilustrasi dalam menghitung perbedaan beban pajak penghasilan menggunakan tarif berdasarkan UU 36/2008 dan PP 46/2013. Dari hasil penghitungan berdasarkan simulasi, terdapat penurunan pajak terutang bagi wajib pajak dengan profit margin di atas 10%, sedangkan peningkatan pajak terutang bagi wajib pajak dengan profit margin kurang dari 10%.

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan melakukan perbandingan jumlah beban pajak menggunakan tarif pajak berdasarkan PP 46/2013 dengan tarif final 1% langsung dari peredaran bruto dan tarif pajak berdasarkan UU 36/2008 tentang pajak penghasilan dengan tarif umum sebesar 25% serta pengurangan tarif sebesar 50% dari penghasilan neto atau laba sebelum pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menghitung berapakah total beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak UMKM yang memperoleh omzet sampai dengan Rp 4.800.000.000 menggunakan peraturan tarif pajak final dan tarif pajak umum serta penulis akan membagikan kuesioner terhadap beberapa UMKM yang berada di Jawa Tengah dan DIY. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan jumlah beban pajak menggunakan tarif PP No. 46/2013 dan tarif UU No. 36/2008 serta mengetahui opini pelaku UMKM terhadap PP No. 46/2013.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian-penelitian telah dilakukan untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah 46/2013 yang mengatur Pajak Penghasilan yang dikenakan atas Penghasilan yang diperoleh dari Usaha yang Diterima oleh Wajib Pajak dengan pendapatan kotor Tertentu. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian dirumuskan menjadi:

1. Apakah UMKM yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendapatan kotor sampai dengan Rp 4.800.000.000 dalam setahun merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya PP No. 46/2013?
2. Adakah perbedaan jumlah beban PPh terutang menggunakan tarif umum UU No. 36/2008 dan tarif final PP No. 46/2013 pada Wajib Pajak (WP) Badan dan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi?
3. Apakah implementasi PP No. 46/2013 sudah mempertimbangkan keadilan?
4. Apakah dampak diterapkannya PP No. 46/2013?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Untuk mengetahui bahwa UMKM yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendapatan kotor sampai dengan

Rp 4.800.000.000 dalam setahun merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya PP No. 46/2013.

2. Untuk mengetahui perbedaan jumlah beban PPh terutang menggunakan tarif umum UU No. 36/2008 dan tarif final PP No. 46/2013 pada WP Badan dan WP Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah implementasi PP No. 46/2013 sudah mempertimbangkan keadilan.
4. Untuk mengetahui dampak penerapan PP No. 46/2013.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Didasarkan pada tujuan penelitian di atas, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Teoritis

Setelah melakukan penelitian ini, dapat diketahui perbedaan antara PPh terutang berdasarkan tarif umum dan tarif final pajak penghasilan, dan memberikan kontribusi dalam Akuntansi terutama Akuntansi Perpajakan.

2. Bagi Peneliti

Peneliti mampu memahami pengaruh implementasi PP No. 46/2013 bagi UMKM. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya wawasan di bidang perpajakan, khususnya regulasi perpajakan.

3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan terkait perpajakan dan dapat menjadi acuan serta bahan informasi bagi wajib pajak badan dan orang pribadi dalam pengambilan keputusan.

4. Bagi Pemerintah

Kesimpulan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak yang menentukan kebijakan perpajakan agar dapat menentukan kebijakan yang lebih baik bagi Wajib Pajak (WP).

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan atau bahan masukan untuk penelitian selanjutnya atau bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil dan pembahasan berisi tentang deskripsi atas ilustrasi implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan jumlah beban pajak penghasilannya, analisis PP 46/2013 dilihat dari sisi keadilan, dan hasil survei penerapan PP 46/2013 pada UMKM.

BAB V**PENUTUP**

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan peneliti selanjutnya.

.